



Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan

Volume 8 Nomor 1 Februari 2026 Hallaman 78 - 88

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

Analisis Kebijakan Pendidikan : Tinjauan Konseptuall dan Teoritis

Zahalra Violina Afya^{1✉}, Untung Khoiruddin², Erwin Indrioko³

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : zahhdrive@gmail.com¹, untungkhoiruddin@gmail.com², indriokoerwin@gmail.com³

Abstrak

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen startegis negara yang menentukan arah, kualitas, dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang llingkup, komponen, karakteristik, serta implikasi kebijakan pendidikan di Indonesia melalui kajian konseptuall dan teoritis. Meskipun kajian kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan analisis konseptuall dengan realitas implementasi dan evaluasi kebijakan secara komprehensif, sehingga penelitian ini secara eksplisit berkontribusi dengan menghaldirkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan perlumusan kebijakan, dinamika implementasi di lapangan, dan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis bukti secara komprehensif, yang belum banyak dibahas dalam kajian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap jurnall ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnall daring, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik melalui Tahapan identifikasi, klasifikasi, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan konseptuall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia dipahami sebagai rangkaian keputusan normatif dan operasionall yang mencakup tujuan, perencanaan, program, keputusan, dan dampak. Namun implementasinya masih menghaldapi berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan sumber daya, keterbatasan kapasotas institusional, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, evaluasi kebijakan cenderung berfokus pada indikator output dan belum mengukur outcome jangka panjang secara holistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pendidikan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberllanjutan guna meningkatkan mutu dan keadilan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Implementasi, Evaluasi.

Abstract

Educational policy is a strategic instrument of the state thalt determines the direction, quality, and equity of the national education system. This study aims to analyze the concepts, scope, components, chalracteristics, and implications of educational policy in Indonesia through a conceptual and theoretical review. Although numerous studies on educational policy halve been conducted, there remlains a research gap in integrating conceptual analysis with the realities of policy implementation and evaluation in a comprehensive manner. Therefore, this study explicitly contributes by proposing an integrative analytical framework thalt systematically links policy formulation, field-level implementation dynamics, and evidence-based policy evaluation approaches, which halve not been extensively addressed in previous studies. This research employs a lliterature review method with a descriptive-analytical approach, drawing on scholarly journal articles, academic books, and relevant policy documents. Data were collected through systematic searches of online journal databases and subsequently analyzed using content analysis techniques and thematic synthesis. The analysis was conducted through several stages, including identification, classification, data reduction, interpretation, and the drawing of conceptual conclusions. The findings indicate thalt educational policy in Indonesia is understood as a series of normative and operational decisions encompassing objectives, planning, programs, decisions, and impacts. However, its implementation continues to face various structural challlenges, including resource disparities, limited institutional capacity, and weak coordination among stakeholders. In addition, policy evaluation tends to focus predominantly on output indicators and hals not yet holistically measured long-term outcomes. This study emphasizes the importance of reformulating educational policies thalt are adaptive, evidence-based, and sustlainability-oriented in order to enhalnce the quality and equity of national education.

Keywords: Education Policy, Implementation, Evaluation.

Copyright (c) 2026 Zahalra Violina Afya, Untung Khoiruddin, Erwin Indrioko

✉ Corresponding author :

Email : zahhdrive@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i1.8753>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan sosial. Namun efektivitasnya penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh praktik pembelajaran di ruang kelas, melainkan sangat dipengaruhi oleh arah, konsistensi, dan kualitas kebijakan pendidikan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah (Panoyo, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, sebab akses terhadap pendidikan berkualitas terbukti mampu memutus rantai kemiskinan dan memperluas peluang sosial ekonomi masyarakat (Rochman et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, kompleksitas kebijakan pendidikan semakin meningkat seiring dengan perubahan sosial, politik, dan tata kelola pemerintahan yang berlangsung dinamis dalam dua dekade terakhir.

Komitmen negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tercermin dalam berbagai kerangka regulatif. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang secara tegas mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ketentuan tersebut memungkinkan bahwa pendidikan merupakan urusan strategis yang harus dijamin oleh negara. Kebijakan yang tepat memungkinkan sistem pendidikan berjalan secara efektif, terarah, serta mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah (Miftah, 2022). Namun pada tataran implementasi masih dijumpai berbagai persoalan struktural. Ketimpangan mutu pendidikan, serta variasi capaian hasil belajar menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berjalan efektif dan berkeadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan bukan hanya sekedar instrumen administratif, tetapi merupakan mekanisme strategis yang menentukan arah pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh keserasan antara perumusan kebijakan, konteks loka, dan kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Studi oleh (Rozak, 2021) menemukan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia menghasilkan variasi implementasi kebijakan yang signifikan antar daerah, terutama dalam pengelolaan kurikulum dan pembiayaan pendidikan. Temuan serupa diungkapkan oleh (Miftah, 2022) yang menyatakan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kapasitas kebijakan di tingkat lokal. Studi oleh (Amri, 2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul seperti konsistensi kebijakan dan kesinambungan antar periode pemerintahan, ketidaksinkronan antara rumusan kebijakan dan implementasinya di tingkat satuan pendidikan, dan keterbatasan mekanisme evaluasi menjadi bukti yang menjembatani hasil penelitian dengan praktik kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kebijakan pendidikan dari sudut pandang implementasi maupun evaluasi, sebagian besar masih bersifat parsial dan terfokus pada aspek tertentu, seperti kurikulum, pembiayaan, atau desentralisasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kajian konseptual dan teoritis yang integratif dengan menganalisis kebijakan pendidikan sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup ruang lingkup, komponen karakteristik, serta implikasi strategisnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menekankan keterkaitan antara dinamika kebijakan, perubahan struktur kewenangan, dan tantangan kontemporer pendidikan nasional. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat masih ditemukannya persoalan konsistensi kebijakan antar periode pemerintahan, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, serta keterbatasan penggunaan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan kebijakan pendidikan melalui pengembangan kerangka analisis integratif yang memadukan aspek konseptual, implementatif, dan evaluatif dalam satu kesatuan sistem kebijakan, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya. Temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pengelola satuan pendidikan dan pemangku kepentingan sebagai dasar untuk

memahami dinamika kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan di tingkat operasional, serta sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan demikian kajian teoritis ini sangat penting dilakukan guna memperkaya perspektif keilmuan dalam menganalisis dinamika kebijakan tersebut. Melalui kajian teoritis, dapat disusun perangkat analisis yang lebih komprehensif sehingga mampu menangkap kompleksitas persoalan pendidikan nasional, serta menyediakan dasar pertimbangan yang kuat bagi penyusunan evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang lingkup, komponen, karakteristik, serta implikasi strategis kebijakan pendidikan khususnya yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan desain analisis deskriptif analitis untuk mengkaji konsep, ruang lingkup, karakteristik, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Objek kajian terdiri atas sekitar 20 literatur yang meliputi artikel jurnal nasional, buku akademik, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir dan relevan secara teoritis maupun empiris. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan reputasi sumber, kebaruan publikasi, dan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Pemilihan subjek penelitian berupa literatur ilmiah karena penelitian ini bertujuan membangun pemahaman konseptual dan teoritis yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga sumber data yang paling relevan adalah hasil-hasil penelitian terdahulu, karya akademik, dan regulasi resmi pemerintah. Literatur yang dikaji juga dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan keterbaruan analisis dan relevansi dengan dinamika kebijakan pendidikan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal daring, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik melalui Tahapan identifikasi, klasifikasi, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan konseptual. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis selama periode tertentu melalui penelusuran basis data jurnal daring nasional, serta repositori dokumen kebijakan pemerintah. Analisis data dilakukan secara runtut melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi literatur yang relevan, klasifikasi berdasarkan tema dan fokus kajian, reduksi data untuk menyeleksi informasi yang substansial, interpretasi temuan berdasarkan kerangka konseptual kebijakan pemerintah, dan penarikan kesimpulan konseptual melalui sintesis tematik. Kebasahan data melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan serta implikasinya bagi perumusan kebijakan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi dan Ruang lingkup Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang juga dapat ditemukan dalam bahasa Inggris, Yunani, dan Sanskerta. Dalam bahasa Inggris, *Policy* berarti kebijakan. Dalam Bahasa Yunani, *poiteia* artinya tindakan yang ditentukan oleh pemerintah atau dalam istilah lain merupakan strategi yang dibuat, ditentukan, dan dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani, *polis* yang berarti negara-kota. *Pur* berarti kota dalam bahasa Sanskerta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam hal ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok, maupun individu. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang memungkinkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan merujuk pada keputusan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki sifat umum yang ditujukan untuk masyarakat luas (Pratiwi et al., 2024).

Kebijakan pendidikan juga merupakan keputusan dan tindakan publik yang dirancang untuk mengarahkan proses pendidikan menuju tujuan tertentu (Tawa, 1994). Kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan (Dwi et al., 2024). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai politik, aturan, keputusan undang-undang, peraturan konvensi, kesepakatan serta rencana strategis lainnya (Rahmah et al., 1907). Adapun contoh kebijakan adalah : (1) Undang-undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan lain sebagainya.

Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengeluarkan berbagai potensi yang meliputi karakter, pemikiran, kemauan, yang ada pada diri setiap orang untuk dapat dibimbing ke arah yang lebih baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Rahman, 2022).

Dari masing-masing pemaknaan mengenai kata kebijakan dan pendidikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan atau keputusan yang telah dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur dan menjadi pedoman upaya-upaya mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. (Carter V Good dalam Rozak, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk pengoperasian pendidikan yang sifatnya membimbing. Hal ini sejalan dengan Pendapat Disas yang dikutip oleh (Merentek et al., 2023). yang menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan nilai terhadap sistem nilai dan faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai rencana umum untuk memandu pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Dalam menetapkan kebijakan pendidikan, agar hasilnya dapat diterima dan dirasakan oleh setiap kalangan perlu adanya komponen kebijakan pendidikan. Ada lima komponen menurut Chales O. Jones untuk mewujudkan sebuah kebijakan pendidikan.

a. *Goal* (Tujuan)

Tujuan merupakan komponen utama dalam membentuk sebuah kebijakan. Tujuan merupakan hasil yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sebuah kebijakan berawal dari sebuah tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Sehingga, tujuan pendidikan harus disusun secara jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

b. *Plan* (Rencana)

Rencana adalah Tahapan lanjutan setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Rencana berfungsi sebagai ide atau rancangan yang disusun untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga proses manajemen dan kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih jelas serta jelas dalam proses pelaksanaannya.

c. *Programme* (Program)

Program adalah proses atau rangkaian kegiatan yang menjadi bentuk nyata dari rancangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan program dalam kebijakan pendidikan diharapkan mampu menghidupkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

d. *Decision* (Keputusan)

Keputusan adalah hasil kesepakatan dari program yang telah dirancang sebelumnya. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap berbagai alternatif yang disusun pada tahap program. Keputusan dalam kebijakan pendidikan sebaiknya bersifat rasional agar dapat diterima dan tidak menimbulkan penolakan dari pihak tertentu.

e. *Effect* (Dampak)

Dampak adalah konsekuensi yang mungkin timbul ketika suatu kebijakan pendidikan diterapkan. pertimbangan terhadap dampak setelah pelaksanaan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Adanya dampak yang muncul dari diaksanakannya sebuah kebijakan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana agar kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya (Pratiwi et al., 2024).

Karakteristik kebijakan pendidikan dapat menjadi sebuah acuan untuk membuat keputusan dalam menetapkan kebijakan pendidikan. Terdapat 6 karakteristik kebijakan pendidikan diantaranya :

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan. Untuk dapat memberikan dampak dan kontribusi secara nyata bagi pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat sasaran. Selain itu agar pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tersebut dapat memahami tujuannya.

b. Memiliki aspek legal formal

Kebijakan pendidikan wajib diimplementasikan dengan aman serta kondisi harus diciptakan agar kebijakan pendidikan dapat diakui secara sah oleh hukum dan diterapkan secara lokal. Sehingga, kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan syarat konstitusional yang berlaku di daerah agar sah dan resmi berlaku di daerah.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum tentu memerlukan nilai operasional agar dapat diimplementasikan. Hal ini penting untuk memperjelas fungsi dalam mendukung pengambilan keputusan, arah kebijakan yang hendak dicapai, serta target pendidikan yang diinginkan.

d. Dibuat oleh pihak yang berwenang

Kebijakan pendidikan harus disusun dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan maupun lingkungan luar pendidikan. Unsur minimal yang terlibat dalam kebijakan pendidikan mencakup pengelola lembaga, pengelola pendidikan, serta politisi yang berperan dalam bidang pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tentu tidak terlepas dari realitas yang muncul setelahnya. Apabila kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik, maka perlu dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Namun sebaliknya, jika terdapat kekeliruan, harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, pedoman pembentukan karakter dapat dilakukan melalui evaluasi yang sederhana dan efisien.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga memerlukan kejelasan sistem dalam setiap aspek yang diatur. Sistem tersebut harus dirancang secara efektif, efisien, dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, maupun rapuh akibat adanya faktor yang saling atau saling bertentangan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan secara eksternal dengan kebijakan lain, seperti kebijakan politik, moneter, serta kebijakan di tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah (Rozak, 2021).

Karakteristik kebijakan pendidikan yang telah tertulis di atas tidak hanya berfungsi sebagai kriteria normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin keberhasilan kebijakan pendidikan. kebijakan pendidikan yang memenuhi karakteristik tujuan yang jelas, egritas forma, konsep operasional, aktor yang berwenang, evaluasi, dan sistematika yang terintegrasi akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima, diimplementasikan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implikasi temuan ini

menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam perumusan kebijakan pendidikan, di mana pembuat kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kualitas proses perumusan, implementasi, dan evaluasinya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat benar-benar berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pembangunan manusia berkelanjutan.

Keberadaan kebijakan pendidikan sangat penting dalam menjalankan pengelolaan sistem pendidikan. Urgensi kebijakan pendidikan antara lain :

- a. Kebijakan pendidikan sebagai dasar menjalankan proses pendidikan
Kebijakan pendidikan hadir sebagai sebuah dasar atau pedoman dalam menjalankan praktik pendidikan serta pengelolaannya. Tanpa adanya kepastian pedoman dalam menjalankan pendidikan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b. Kebijakan pendidikan sebagai penentu arah tujuan pendidikan
Kebijakan pendidikan membantu para pihak yang menjalankan tugas-tugas kependidikan. Berbagai kebijakan yang telah disusun tentu terlebih dulu dilakukan Analisa dan pertimbangan yang cukup untuk memberikan rambu-rambu dalam menjalankan sistem pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.
- c. Memberikan kepastian hukum dalam menjalankan sistem pendidikan
Adanya kebijakan pendidikan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang secara legal dan sah diakui konstitusi. Hal ini memberikan jaminan kepastian terhadap berbagai konsekuensi atas tindakan-tindakan dalam menjalankan sistem pendidikan di suatu wilayah.
- d. Upaya menyelesaikan masalah pendidikan
Dengan adanya kebijakan pendidikan disusun sebagai upaya menyelesaikan masalah pendidikan dan perbaikan masalah pendidikan yang terus dilakukan secara berkelanjutan (Pratiwi et al., 2024).

Sebuah keputusan tidak dapat diambil dengan gegabah, karena keputusan yang telah diambil akan memiliki dampak terhadap setiap elemen yang berkaitan. Maka setiap keputusan harus diambil dengan penuh pertimbangan dan keakuratan agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut Utami yang dikutip oleh (Halyati et al., 2021) bahwa pengambilan keputusan terdiri dari tiga Tahapan yaitu :

1. Tahapan Penyeidikan
Tahapan penyeidikan merupakan tahapan dalam menganalisis kondisi lingkungan yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Pada Tahapan ini data yang telah ditemukan masih bersifat mentah yang kemudian di olah dan diujikan agar mengetahui permasalahan yang dihadapi.
2. Tahapan Perancangan
Tahapan perancangan ini adalah Tahapan yang melalui beberapa proses, yaitu proses pendaftaran, proses pengembangan, dan proses penganalisasian tindakan yang akan dilakukan.
3. Tahapan Pemilihan
Tahapan ini dilakukan dengan pemilihan dari tindakan dan beberapa tindakan yang ada. (Halyati et al., 2021)

Selain Tahapan pengambilan keputusan terdapat metode pengambilan keputusan/ kebijakan, yaitu :

1. Rasional
Menitikberatkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara logis dan terstruktur, dimana setiap alternatif ditelaah secara menyeluruh untuk menentukan solusi terbaik. Dalam bidang pendidikan, metode ini diwujudkan melalui :

- a. Analisis mendalam : pemimpin pendidikan melakukan kajian komprehensif terhadap persoalan yang muncul dengan mengumpulkan data relevan serta mempertimbangkan berbagai pilihan solusi sebelum menetapkan keputusan.
 - b. Perencanaan strategis : penyusunan rencana jangka panjang yang berlandaskan data serta *update* pendidikan, guna mencapai tujuan lembaga pendidikan.
2. Terbatas
- Konsep rasionalitas terbatas (*Bounded Rationality*) yang dikemukakan oleh Herbert Simon menjelaskan bahwa keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam dunia pendidikan, hal ini tampak pada :
- a. Keputusan yang memadai : ketika pemimpin pendidikan tidak selalu mencari solusi paling optimal, melainkan memilih alternatif yang cukup layak dan praktis sesuai dengan kondisi dan keterbatasan sumber daya.
 - b. Adaptasi dengan keterbatasan : kesadaran akan keterbatasan informasi maupun sumber daya sehingga keputusan dibuat berdasarkan data yang tersedia dan dapat dipercaya.
3. Intuisi
- Pengambilan keputusan berbasis intuisi didasarkan pada pengamatan, perasaan, serta pengetahuan implisit. Dalam bidang pendidikan, penerapannya dapat berupa :
- a. Pengamatan praktis : guru atau kepala sekolah memanfaatkan pengamatan sebelumnya untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi mendesak, misalnya saat menangani konflik antar siswa.
 - b. Kepekaan terhadap situasi : mengandaskan intuisi untuk memahami dinamika kelas atau kebutuhan siswa tanpa melalui analisis formal yang panjang (Sari et al., 2024).

Implementasi dan Tantangan Kebijakan Pendidikan

Beragam penelitian empiris di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara perumusan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah dan realitas pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, implementasi kebijakan pendidikan periode 2015-2024 menemukan sejumlah kelemahan struktural dan operasional yang meliputi kurangnya sumber daya manusia (guru dan tenaga pendidik), disparitas pendanaan dan fasilitas fisik antar sekolah, lemahnya koordinasi tata kelola, serta minimnya penyesuaian kebijakan terhadap kondisi di banyak daerah (Nabia & Abidin, 2025; Rahmi et al., 2025).

Secara khusus, implementasi kebijakan baru seperti Kurikulum Merdeka di sekolah di daerah pedesaan atau terpencil sering menemui hambatan serius. Dalam penelitian di sebuah sekolah menengah di pedesaan yang menerapkan Kurikulum Merdeka, guru melaporkan tantangan besar dalam menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi, sebab keterbatasan dukungan institusi dan kapasitas guru membuat praktik ideal sulit diwujudkan (Beadinna & Fauziati, 2023). Lebih jauh ketimpangan struktur seperti distribusi guru yang tidak merata, kekurangan tenaga profesional, serta disparitas fasilitas fisik dan finansial memperparah kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah (Muchtar et al., 2025). Akibatnya meskipun kebijakan nasional menetapkan standar atau kerangka kurikulum yang seragam, dalam praktik banyak sekolah yang belum mencapai implementasi yang konsisten, terutama dalam hal kualitas pengajaran, ketersediaan materi pembelajaran, dan layanan pendidikan yang layak (Nadzifa et al., 2025).

Situasi ini meningkatkan kebutuhan mendesak akan mekanisme transfer pengetahuan, pelatihan profesional bagi guru dan tenaga pendidik, serta sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang responsif. Tanpa langkah-langkah tersebut, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di sekolah akan terus berlangsung membatasi efektivitas kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam pemerataan dan kualitas pendidikan.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Dalam banyak kasus kebijakan pendidikan di Indonesia, evaluasi terhadap program atau kebijakan yang diterapkan seringkali halnya terbatas pada pengukuran aspek *output* misalnya jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, atau angka lulusan siswa. Namun pengukuran semata terhadap indikator-indikator tersebut tidak cukup untuk menjelaskan seberapa jauh kebijakan tersebut benar-benar memberikan perubahan signifikan dalam kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kritik terhadap pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak hanya pada keuaran kuantitatif awal, tetapi juga pada *outcome* jangka panjang seperti kemampuan siswa mengasai kompetensi abad-21, akses dan kesetaraan pendidikan, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan komunitas, serta dampak sosial terhadap pemerataan pendidikan (Kunandar, 2011).

lebih jauh, evaluasi yang halnya berfokus pada output tanpa menelaah outcome potensia beresiko menghasilkan gambaran keberhasilan yang semu. Evaluasi yang mendalam terhadap outcome menjadi krusial untuk menilai efektivitas kebijakan secara nyata (Kunandar, 2011). Di samping itu adanya hubungan yang lebih kuat antara penelitian akademik dan proses pembuatan kebijakan. Data empiris yang dihasilkan oleh penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif harus menjadi bagian integral dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis bukti, tidak hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan politis semata. Evaluasi yang sistematis dan akurat akan memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan mengenai aspek mana yang berhasil, mana yang perlu direvisi, dan bagaimana adaptasi kebijakan dapat dilakukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d. 2025).

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, sangat diperlukan mode evaluasi kebijakan yang holistik mencakup output dan outcome, kuantitatif dan kualitatif, serta kuatnya konektivitas antara riset akademik dan proses kebijakan.

Implikasi Konseptual bagi Perumusan Kebijakan di Indonesia

Terdapat sejumlah implikasi strategis yang perlu diperhatikan agar proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diperlukan perancangan kebijakan bersifat adaptif terhadap kondisi lokal dan mempertimbangkan dinamika sosial budaya setiap wilayah. Pendekatan kontigensi tersebut penting mengingat variasi karakteristik daerah, sumber daya sekolah, serta kebutuhan peserta didik dapat berbeda secara signifikan antar provinsi maupun antar kabupaten, sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan dengan satu pola baku yang seragam bagi semua konteks pendidikan di Indonesia.

Kemudian, penguatan kapasitas evaluasi kebijakan pendidikan menjadi urgensi tersendiri untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan dapat dinilai secara menyeluruh. Pendekatan evaluatif ini bukan hanya menilai keberhasilan dari sisi produk akhir, tetapi juga mengamati faktor konteks, kesiapan, instrumen pendukung, serta dinamika proses pelaksanaan. Dengan demikian, penilaian kebijakan tidak sekedar berfokus pada output statistik, melainkan juga pada outcome jangka panjang seperti kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Selain itu, hubungan antara komunitas akademik dan pembuat kebijakan perlu diperkuat melalui saluran komunikasi ilmiah, forum konsultasi kebijakan, serta pemanfaatan sistem *evidence-based policy* yang lebih terstruktur. Seama ini belum terdapat mekanisme yang kuat dan sistematis untuk memastikan bahwa bukti ilmiah benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga berbagai kebijakan sering kali lahir cepat daripada kajian akademik yang mendasarinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan keberlanjutan arah kebijakan lintas periode pemerintahan. Fragmentasi kebijakan akibat pergantian kepemimpinan baik ditingkat pusat maupun daerah berpotensi menghasilkan inkonsistensi program, perubahan prioritas pembelajaran, hingga lemahnya politik jangka panjang serta investasi pada kapasitas kelembagaan agar

rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional (Dahyanti et al., 2025).

Implikasi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, pertama kebijakan pendidikan perlu dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tujuan dan rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan konteks masyarakat. Kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan harus diandasi oleh bukti empiris dan analisis komprehensif untuk mengurangi risiko kegagalan implementasi. Ketiga, evaluasi terhadap dampak kebijakan harus menjadi prosedur rutin untuk memetakan efek yang dihasilkan serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, kebijakan pendidikan akan lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan pendidikan nasional secara holistik.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serupa dengan penelitian terdahulu milik (Rozak, 2021) dan (Amri, 2021) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perumusan kebijakan dan kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sistemik dan berutang, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kesiapan institusional, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan kebijakan tidak cukup dilakukan pada tataran normatif, tetapi harus menyeluruh aspek operasional secara konkret.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memperkuat temuan (Miftah, 2022) dan (Nabia & Abidin, 2025) yang menyatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas kebijakan di tingkat lokal. Persamaan temuan ini dapat dijelaskan oleh masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan, maupun kesiapan kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka kebijakan pendidikan sebagai satu siklus utuh, mulai dari perumusan hingga evaluasi.

Selain aspek implementasi, penelitian ini juga menemukan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung masih berfokus pada output, seperti angka partisipasi dan kelulusan, dan belum mengukur outcome jangka panjang secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan (Rahmi et al., 2025) yang mengkritik praktik evaluasi kebijakan pendidikan yang bersifat administratif dan kurang berbasis dampak substantif. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa paradigma evaluasi kebijakan pendidikan masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif jangka pendek, sehingga belum mampu menangkap perubahan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan kapasitas peserta didik secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan sejumlah studi sebelumnya yang bersifat sektoral, seperti penelitian yang hanya berfokus pada implementasi kurikulum atau kebijakan pendidikan inklusif (Beadinna & Fauziati, 2023; Muchtar et al., 2025). Perbedaan ini muncul, karena penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada konteks tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji kebijakan pendidikan pada level konseptual dan sistemik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menunjukkan keterkaitan antara desain kebijakan, dinamika implementasi, dan kemahalan evaluasi secara lebih komprehensif dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga menguatkan pandangan bahwa lemahnya integrasi antara riset akademik dan proses perumusan kebijakan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan (Dahyanti et al., 2025) yang menegaskan inkonsistensi kebijakan antarperiode pemerintahan serta minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan berdampak pada keberlanjutan kebijakan pendidikan. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih lebih bersifat reaktif daripada berbasis bukti empiris yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi analitis dengan mengintegrasikan dimensi konspektua, implementatif, dan evaluatif dalam satu kerangka kebijakan pendidikan yang utuh. Perbedaan pendekatan inilah yang memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga menjelaskan alasan struktural dan sistemik mengapa kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan berkeadilan. Integrasi tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar pada aspek implementasi dan evaluasi, meskipun secara konseptual telah dirumuskan dengan tujuan dan kerangka normatif yang jelas. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara perumusan kebijakan, kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan, serta praktik evaluasi yang masih berorientasi pada output administratif dan belum mengukur outcome jangka panjang secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis integratif yang memosisikan kebijakan pendidikan sebagai salah satu siklus kebijakan yang utuh, dengan menautkan dimensi konseptual, implementatif, dan evaluatif dalam satu kerangka analisis sistemik. Implikasi utama penelitian ini untuk menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pendidikan berbasis bukti, peningkatan kapasitas implementasi di tingkat lokal, serta pengembangan mode evaluasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan benar-benar mampu meningkatkan mutu dan keadilan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.778> Copyright
- Beadinna, N., & Fauziati, E. (2023). International Journal Of Educationa Rura Schoos And The Policy-Practice Gap: Teachers ' Struggles With Differentiated Instruction In Eastern Indonesia. *Ijets : International Journal Of Educationa Technoogy And Society*, 2(3), 26–36. <https://doi.org/10.61132/Ijets.v2i3.389>
- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., Darmansah, T., Studi, P., Pendidikan, M., Isam, U., & Sumatera, N. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Isam*, 2(1), 87–100. <https://doi.org/10.61132/Hikmah.v2i1.545>
- Dwi, F. E., Mauana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/Jiip.v7i7.4773>
- Halyati, F., Zuvira, R., & Gistituati, N. (2021). Embaga Pendidikan: Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.29210/3003911000>
- Kunandar. (2011). Evaluating Program Of Curriculum Deveopment And Impementation At Schoo. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 2(2), 171–181.
- Merentek, T. C., Antang, D., Rotty, V. N. J., & Umapow, H. R. (2023). *Kebijakan Pendidikan*. Ukit Press. <https://books.google.co.id/books?id=Ch2-Eaaaqbaj>
- Miftah, M. (2022). Halkekat Dan Peran Penting Kebijakan Pendidikan Untuk Kualitas Uusan. *Edu Cendikia : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(2), 362–372. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i2.1681>
- Muchtar, C. O., Purba, A. A., Sintya, J., Siagian, M. F., & Halrahap, N. M. (2025). Systematic Literature Review : Examining Indonesia ' S Educationa Inequaity Factors And Government Equity Poicies. *International Journal Of Education Practice And Policy*, 3(1), 8–16.

- 88 *Analisis Kebijakan Pendidikan : Tinjauan Konseptual dan Teoritis - Zahara Violina Afya, Untung Khoiruddin, Erwin Indrioko*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i1.8753>
<https://doi.org/10.61220/Ijepp.V3i1.0257>
- Nabia, H., & Abidin, M. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Proses Pendidikan Terhadap Manajemen Kurikulum Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mtsn 2 Kota Kediri. *Journa Of Isamic Education Management Joiem*, 6(1), 1–10.
- Nadzifa, . A., Fajaruddin, S., Ermawati, E., & Wati, A. R. (2025). *Antara Kebijakan Dan Praktik : Mengungkap Realitas Implementasi Kurikulum Merdeka Di Pendidikan Menengah Between Policy And Practice : Unveiling The Realties Of Merdeka Curriculum Impementation In Secondary Education*. 4(1), 1–11.
- Panoyo. (2024). *Pendidikan Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa Indonesia Menuju Masa Depan Berkelanjutan*. 2(1).
- Pendidikan Dasar Dan Menengah, K. (2025). *Kajian Akademik Kebijakan Evaluasi Pendidikan Indonesia*.
- Pratiwi, D., Putra, S., Darwiyanti, A., Nansi, W. S., Saptadi, N. T. S., Perang, B., Purwana, R., Buan, A., & Novianti, W. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=Mr4deqaaqbaj>
- Rahmah, A. N., Farkhaln, A., Awatasi, U., & Setiawan, F. (1907). *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Abstrak*. 16(5), 1921–1928.
- Rahman, A. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal A Urwatu Watsqa : Kajian Pendidikan Isam*, 2(1), 1–8.
- Rahmi, I., Suistiawan, E., & Kusmiran, A. H. (2025). Systematic Literature Review : Identifikasi Gap Dan Kelemahan Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Periode 2015-2024. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September), 745–759.
- Rochman, S., Indriyani, F., Sapitri, S. D., Anggreni, P., & Yuiani, S. (2025). Peran Pendidikan Berkualitas Dalam Memutus Kemiskinan Untuk Mendukung Sdgs Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1503–1512. <https://jpion.org/index.php/jpi>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Aim Joiurna Of Isamic Education*, 3(25), 197–208.
- Sari, A. A., Kirana, A. E. W., Susiowati, R. A. J., Hidayat, R., & Kusuma, I. R. (2024). Teori Pengambilan Keputusan: Impikasi Teori Pengambilan Keputusan Dalam Pendidikan. *Indonesian Journa Of Pubic Administration Review*, 2(2), 8. <https://doi.org/10.47134/Par.V2i2.3501>
- Tawa, A. B. (1994). *Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar*. 107–117.